



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sampai pada pelaporan hasil kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini memuat tentang pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024. Program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan target capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan pembangunan di desa dan kelurahan pada khususnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum.

Kuala Tungkal, Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Pembina

NIP. 19840624 201101 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pencapaian tujuan dan Sasaran Dinas yang mengacu terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders).

LKIP Tahun 2024 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 4 (empat) program; Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan jumlah total anggaran Rp7.331.990.964,- yang dapat terealisasi sebesar Rp6.576.882.991,- atau sebesar 89,70%.

Untuk permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun 2024 antara lain; (1) Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa (2) Pengelolaan keuangan dan asset desa yang belum efektif dan efisien (3) Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi permasalahan diatas, adalah dengan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap aparatur desa.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Isu Strategis	7
C. Dasar Hukum	7
D. Sistem Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Langkah Kedepan	35

Lampiran; Perjanjian Kinerja 2024

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6
Tabel II.1 Rencana Strategis.....	11
Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama	11
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024 sebelum Perubahan	11
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024 setelah Perubahan	11
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional...	12
Tabel III.1 Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel III.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional	16
Tabel III.3 Tabel Klasifikasi 114 Desa Periode 2021-2024 berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM).....	18
Tabel III.4 Data IDM Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024....	19
Tabel III.5 Jumlah penyelenggara pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan.....	22
Tabel III.6 Target dan Realisasi RPJMD 2021-2026.....	23
Tabel III.7 Capaian kinerja terhadap target akhir Renstra.....	26
Tabel III.8 Perbandingan capaian IDM Kabupaten, Provinsi dan Nasional.....	26
Tabel III.9 Program dan Kegiatan yang berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun.....	28
Tabel III.10 BUMdesa yang berkontribusi terhadap PAD.....	29
Tabel III.11 Realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa...	32
Tabel III.12 Anggaran Tahun 2024 dan Realisasinya.....	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan peran aktif seluruh Lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bina administrasi pemerintahan desa, serta fasilitasi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2(dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan fungsi;

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi; ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penyusunan profil desa, fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan

lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi bulan gotong royong masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa, fasilitasi tim penggerak PKK, peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasam antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat, peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan;

- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten, fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten, dan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan, pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM desa) dan Lembaga Kerjasama antar Desa, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina administrasi pemerintahan desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bina administrasi pemerintahan desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, tata wilayah desa, penataan kewenangan desa, penamaan dan kode desa, penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat, dan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan produk hukum desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, pembinaan laporan kepala desa dan

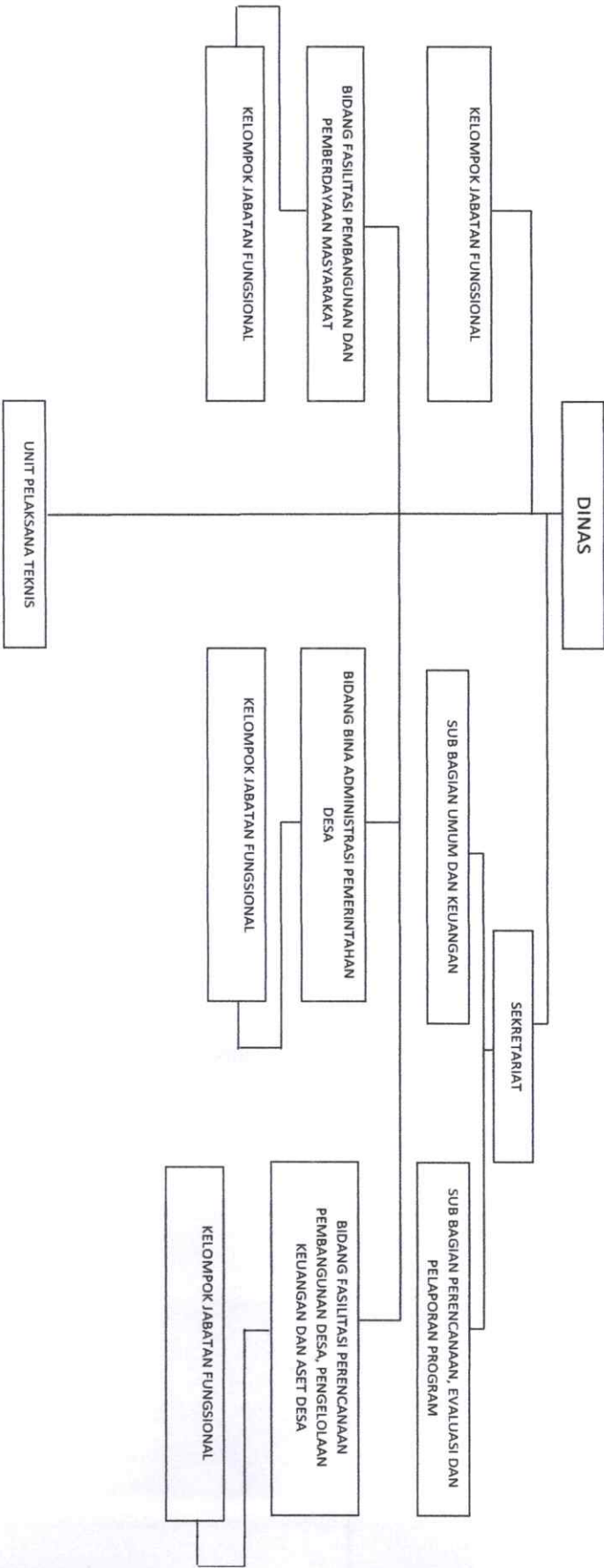
pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;

- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, manajemen pemerintahan desa dan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi pengelolaan aset desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



2. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka keberhasilan melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2024 sebanyak 24 orang ASN (1 orang PPPK) dan 23 orang TKK, sesuai tabel dibawah ini;

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Pendidikan					
				S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pembina Tingkat I	IV /b	1		1				
2	Pembina	IV /a	4	1	3				
3	Penata Tingkat I	III/d	8	1	6	1			
4	Penata	III/c	2		2				
5	Penata Muda	III/a	5		1		4		
6	Pengatur Tingkat I	II/d	2				2		
7	Pengatur	II/c	-						
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1				1		
9	PPPK	IX	1		1				
10	Honorar	-	23		6		17		

B. Isu Strategis

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;

1. Belum optimalnya penataan desa
2. Belum optimalnya Kerjasama yang dilaksanakan oleh desa
3. Masih rendahnya pengetahuan aparatur desa terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
4. Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan
5. Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menjadi kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) berpedoman pada Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2024, dengan memperhatikan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi, yaitu;

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. Sistem Penyajian

Mekanisme penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengacu pada sistematika sebagai berikut;

Bab. I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP.

Bab.II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2021-2026 tujuan, sasaran, indikator dan target selama lima tahun, lalu target IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab. III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta Langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Lampiran;

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu;

1. Visi

“ Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021-2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut;

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis
3. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke 3 (tiga), yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik”

Tabel II.1. Rencana Strategis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
			PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Keberdayaan Desa	Meningkatnya desa maju	Persentase Desa Maju	15,79%	20,18%	27,19%	30%	33%	35%

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur sejauh mana Dinas PMD telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan indikator kinerja utama rencana strategis.

Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama

N o.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	$= \frac{\text{Jumlah Desa Maju berdasarkan data IDM}}{\text{Jumlah Desa Keseluruhan}} \times 100 \%$	Data IDM (Indeks Desa Membangun) Dinas PMD	Kepala Dinas/Pengguna Anggaran

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024 sebelum perubahan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80
		Nilai SAKIP Dinas PMD	70
2.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri	7%
3	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	30%

Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024 setelah perubahan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	81
		Nilai SAKIP Dinas PMD	71.3

2.	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	30%
----	------------------------	----------------------	-----

Perjanjian Kinerja Tahun 2024, merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah terhadap apa yang akan dicapai pada tahun 2024 Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja, merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Tabel. II.5. Perjanjian Kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional sebagai berikut;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
I.	Meningkatnya Penataan Desa	Persentase desa yang dilakukan penataan	100%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%
a.	Terlaksananya pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	2 Desa
II.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Persentase aparatur pemerintahan desa yang telah mendapatkan pelatihan	61%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen
b.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	57 orang
c.	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa	1 dokumen

		dan Lembaga Kerjasama antar desa	
d.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 dokumen
e.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen
f.	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 desa
g.	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen
III.	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%
1.	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten/kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%
a.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	422 lembaga
b.	Terlaksananya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan

c.	Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen
----	---	--	-----------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu ukuran yang dipakai untuk menilai capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah klasifikasi desa berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan hasil dari proses akumulasi rata-rata dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi.

1. Ketahanan sosial terdiri dari;

- Akses pelayanan Kesehatan
- Keberdayaan masyarakat untuk Kesehatan
- Jaminan Kesehatan
- Akses Pendidikan dasar-menengah
- Akses Pendidikan non-formal
- Solidaritas sosial
- Toleransi
- Rasa aman warga desa
- Kesejahteraan sosial
- Akses air bersih dan layak minum
- Akses sanitasi
- Akses energi (listrik)
- Akses infokom

2. Ketahanan ekonomi terdiri dari;

- Keragaman produksi
- Pusat perdagangan
- Distribusi logistic
- Lembaga keuangan dan perkreditan
- Lembaga ekonomi rakyat(koperasi/BUMdesa)
- Restoran, hotel dan penginapan
- Keterbukaan wilayah (angkutan umum, kualitas jalan)

3. Ketahanan ekologi terdiri dari;

- Pencemaran air, tanah, dan udara
- Potensi rawan bencana
- Tanggap/mitigasi bencana

Pengukuran capaian kinerja, sesuai dengan apa yang diperjanjikan Kepala Perangkat Daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut;

1) Membandingkan antara target dan realisasi

Tabel III.1. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	81	82,10
		Nilai SAKIP Dinas PMD	71,3	67,2
2.	Meningkatnya desa maju	Persentase desa maju	30%	24,56%

Realisasi persentase desa maju, tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan sebagian desa maju tersebut telah meningkat statusnya menjadi desa mandiri. Pada tahun 2023 ada 7(tujuh) desa mandiri, meningkat menjadi 14 desa mandiri di tahun 2024.

Tabel III.2. Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon III dan pejabat fungsional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I.	Meningkatnya Penataan Desa	Persentase desa yang dilakukan penataan	100%	100%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%	100%
a.	Terlaksananya pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	2 Desa	0 Desa

II.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Persentase aparatur pemerintahan desa yang telah mendapatkan pelatihan	61%	41%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	114 dokumen
b.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	57 orang	57 orang
c.	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	1 dokumen	1 dokumen
d.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen
e.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1 dokumen	1 dokumen
f.	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 desa	8 desa
g.	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	2 dokumen
III.	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	100%
1.	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	100%	100%

	pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten/kota			
a.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	422 lembaga	425 lembaga
b.	Terlaksananya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	1 laporan
c.	Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	1 dokumen

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III.3. Tabel Klasifikasi 114 Desa periode 2021-2024 berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM)

Klasifikasi Desa	Jumlah Desa berdasarkan Data IDM Tahun			
	2021	2022	2023	2024
1. Desa Mandiri	3 (2,63%)	4 (3,51%)	7 (6,14%)	14 (12,28)
2. Desa Maju	18 (15,79%)	23 (20,18%)	31 (27,19%)	28 (24,56)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2024**

3. Desa Berkembang	91 (79,83%)	87 (76,32%)	76 (66,67%)	72 (63,16)
4. Desa Tertinggal	2 (1,75%)	0	0	0
5. Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0

Tabel III.4. Data IDM Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA DESA	STATUS IDM			
				2021 (28 Mei 2021)	2022 (Kamis,28 April 2022)	2023 (Kamis,27 Juni 2023)	2024 (Kamis, 4 Juli 2024)
1	TUNGKAL ULU	1	BADANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		2	TANJUNG TAYAS	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		3	KUALA DASAL	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		4	PEMATANG PAUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		5	TAMAN RAJA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		6	BRASAU	Maju	Maju	Maju	Maju
		7	GEMURUH	Berkembang	Maju	Berkembang	Berkembang
		8	PEMATANG TEMBESU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		9	BADANG SEPAKAT	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
2	TUNGKAL ILIR	10	TUNGKAL I	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		11	TELUK SIALANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
3	PENGABUAN	12	PARIT PUDIN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		13	SUNGAI SERINDIT	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		14	MEKAR JATI	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		15	SUNGAI PAMPANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		16	PARIT SIDANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		17	SUNGAI JERING	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
		18	PARIT BILAL	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		19	SUAK SAMIN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		20	SUNGAI BAUNG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		21	KARYA MAJU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
4	BETARA	22	SUNGAI RAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		23	PASAR SENIN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		24	PEMATANG LUMUT	Maju	Maju	Maju	Maju
		25	MAKMUR JAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		26	SERDANG JAYA	Maju	Maju	Maju	Maju
		27	TERJUN GAJAH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
		28	LUBUK TERENTANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		29	PEMATANG BULUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
		30	MUNTIALO	Maju	Maju	Maju	Maju
		31	TELUK KULBI	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD

TAHUN
2024

		32	BUNGA TANJUNG	Maju	Maju	Maju	Maju
		33	SUNGAI TERAP	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		34	MANDALA JAYA	Maju	Maju	Maju	Maju
5	MERLUNG	35	PENYABUNGAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		36	LUBUK TERAP	Berkembang	Maju	Maju	Maju
		37	TANJUNG PAKU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		38	TANJUNG BENANAK	Berkembang	Maju	Maju	Maju
		39	BUKIT HARAPAN	Maju	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		40	ADI PURWA	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		41	PINANG GADING	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		42	MERLUNG	Maju	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		43	TANJUNG MAKMUR	Maju	Maju	Maju	Maju
6	TEBING TINGGI	44	PURWODADI	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		45	SUKA DAMAI	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		46	ADI JAYA	Maju	Maju	Maju	Maju
		47	KELAGIAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		48	TELUK PENGKAH	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		49	TALANG MAKMUR	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		50	SUNGAI KERUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		51	DATARAN KEMPAS	Maju	Maju	Maju	Mandiri
		52	DELIMA	Maju	Maju	Maju	Maju
7	BATANG ASAM	53	SRI AGUNG	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		54	SUBAN	Berkembang	Maju	Maju	Maju
		55	TANJUNG BOJO	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		56	KAMPUNG BARU	Maju	Maju	Maju	Maju
		57	LUBUK BERNAI	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		58	RAWA MEDANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		59	SUNGAI PENOBAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		60	RAWANG KEMPAS	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		61	LUBUK LAWAS	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		62	SUNGAI BADAR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
8	RENAH MENDALUH	63	PULAU PAUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		64	RANTAU BENAR	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		65	LAMPISI	Berkembang	Maju	Maju	Maju
		66	CINTA DAMAI	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		67	SUNGAI ROTAN	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		68	MUARA DANAU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		69	TANAH TUMBUH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		70	SUNGAI PAUR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		71	BUKIT BAKAR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
9	MUARA PAPALIK	72	DUSUN MUDO	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
		73	INTAN JAYA	Maju	Maju	Maju	Mandiri
		74	BUKIT INDAH	Berkembang	Berkembang	Maju	Mandiri

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2024**

		75	KEMANG MANIS	Berkembang	Maju	Mandiri	Mandiri
		76	RANTAU BADAQ LAMO	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
		77	LUBUK SEBONTAN	Maju	Maju	Maju	Mandiri
		78	SUNGAI PAPAUH	Maju	Maju	Maju	Mandiri
		79	SUNGAI MULUK	Berkembang	Berkembang	Maju	Mandiri
		80	PEMATANG BALAM	Berkembang	Berkembang	Maju	Mandiri
10	SEBERANG KOTA	81	TUNGKAL IV DESA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		82	KUALA BARU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		83	TELUK PULAI RAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		84	MEKAR ALAM	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		85	HARAPAN JAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		86	KUALA KAHAR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		87	MUARA SEBERANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
11	BRAM ITAM	88	BRAM ITAM KANAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		89	TANJUNG SENJULANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		90	PEMBENGIS	Maju	Maju	Maju	Maju
		91	BRAM ITAM RAYA	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		92	PANTAI GADING	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		93	JATI EMAS	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		94	KEMUNING	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		95	MEKAR TANJUNG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		96	SEMAU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
12	KUALA BETARA	97	SUNGAI DUALAP	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		98	BETARA KANAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		99	SUNGAI GEBAR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		100	DATARAN PINANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		101	TANJUNG PASIR	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		102	SUNGAI GEBAR BARAT	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		103	SUNGAI DUNGUN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		104	KUALA INDAH	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		105	SUAK LABU	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
13	SENYERANG	106	SUNGAI KAYU ARO	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		107	TELUK KETAPANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		108	SUNGAI RAMBAI	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		109	MARGO RUKUN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		110	KEMPAS JAYA	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
		111	LUMAHAN	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		112	SUNGAI LANDAK	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		113	SUNGSANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
		114	SUNGAI KEPAYANG	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sangat tertinggal

0

0

0

0

Tertinggal

2

2

0

0

Berkembang	91	91	76	72
Maju	18	18	31	28
Mandiri	3	3	7	14
	114	114	114	114

Tabel. III.5. Jumlah Penyelenggara Pemerintahan Desa yang mengikuti Pelatihan

No.	Uraian	Jumlah	Yang mengikuti pelatihan				Keterangan
			2021	2022	2023	2024	
1.	Kepala Desa	114 orang		43 Kades	114 orang Kades (pelatihan dari kemendagri)		
2	Perangkat Desa	1108 orang		114 Sekdes	57 Kasi pem 114 orang Sekdes (pelatihan dari kemendagri)	57 Kasi kesra	
Total		1222 orang		157 orang	285 orang	57 orang	499 orang

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PMD**

**TAHUN
2024**

Tabel. III.6 Target dan Realisasi RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi awal (2020)	Target Tahun					Realisasi Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
13.1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206
13.3	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.4	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.5	Persentase pengentasan desa tertinggal (IKK Outcome)	60,35%	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	87,50%	100%	0%	0%
13.6	Persentase peningkatan status desa mandiri (IKK Outcome)	0,00%	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00%	1,10%	3,45%	5,26%

A. Program Penataan Desa

Pelaksanaan program ini dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dilaksanakan Sub Kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa. Desa persiapan Rimbo asri, Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi dan Desa persiapan Sungai Ari, Desa Suban Kecamatan Batang Asam, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Desa Persiapan.

Permasalahannya adalah belum tercapainya kesepakatan batas desa induk maupun desa yang akan dimekarkan.

B. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program ini dengan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan dengan tabel III.4, jumlah aparatur desa (kepala desa dan perangkatnya) yang mengikuti pelatihan dengan target 61%, hanya terealisasi 41% (dari jumlah keseluruhan 1222 orang, yang mendapatkan pelatihan hanya 499 orang).

Sub kegiatan yang dilaksanakan;

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa, telah dilaksanakan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada 114 Desa.

Kendalanya adalah kurangnya SDM secara kuantitas dan kapabilitas.

2. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, telah dilaksanakan pelatihan 57 orang Kasi Pemerintahan Desa.

Permasalahannya adalah kurangnya dana sehingga tidak bisa mencakup semua aparatur

3. Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 113 BUMDesa dan 13 BUMDesa Bersama.

Kendalanya adalah SDM pengelola BUMdesa masih rendah terkait pengelolaan laporan keuangan BUMdesa sehingga pengelola BUMdesa kesulitan dalam Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan, baru pada tanggal 18 Desember 2023, Kemendesa dan PDTT RI merilis penggunaan aplikasi laporan keuangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa keterbatasan dana sehingga tidak bisa melaksanakan pelatihan bagi pengelola BUMdesa untuk pelatihan penyusun laporan, pelatihan pengelolaan usaha dan pelatihan Analisa usaha.

4. Fasilitasi penyusunan profil desa, telah dilaksanakan penyusunan profil desa
Kendalanya kurang meratanya signal di Desa sehingga seringkali terlambat dalam pengisian aplikasi profil desa, dan kurangnya pemahaman operator tentang pengumpulan data dan cara pengisian tiap indikator.
5. Fasilitasi pengelolaan aset desa, telah dilaksanakan pengelolaan aset desa
Kendalanya adalah kurangnya SDM secara kuantitas dan kapabilitas.
6. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, dilakukan fasilitasi terhadap 8 Desa.
Permasalahannya belum adanya Berita Acara Kesepakatan antar Desa secara Poligon (keliling)
7. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, telah dilaksanakan. Desa Sungai muluk menjadi Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten, Kelurahan Mekar Jaya menjadi Juara I Lomba Kelurahan Provinsi Jambi, dan menjadi Juara IV Lomba Desa Tingkat Regional.
Permasalahannya adalah kurangnya dana untuk pembinaan dan kurangnya pemahaman tentang administrasi desa dan pentingnya pengarsipan.

C. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan Kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. Sub kegiatan yang dilaksanakan;

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat. Telah dilaksanakan temu kader posyandu dan lomba posyandu serta pembinaan KPM. Adanya pergantian KPM menjadi kendala yang menyebabkan kurang optimalnya SDM dalam penanganan pencegahan dan penurunan stunting.

2. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Telah dilaksanakan lomba inovasi alat TTG dan lomba sekretariat posyantekdes. Permasalahannya adalah masih kurangnya motivasi pengurus posyantek desa untuk memasyarakatkan teknologi tepat guna di desanya. Pemecahannya adalah dengan adanya hadiah yang lebih menarik.
 3. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Telah dilaksanakan 10 program pokok PKK. Kendalanya adalah jadwal kegiatan dari pusat/provinsi yang belum dapat dipastikan, pemecahannya dengan menyediakan penganggaran yang fleksibel
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel. III.7 Capaian kinerja terhadap Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2026	Realisasi 2024	Capaian terhadap target akhir
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	81	83	82,10	98,92%
	Nilai SAKIP Dinas PMD	71,3	72	67,20	93,33%
2.	Persentase Desa Maju	30%	35%	24,56%	70,17%

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Tabel III.8. Perbandingan capaian IDM Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Rata-rata IDM Nasional	Rata-rata IDM Provinsi Jambi	Rata-rata Kabupaten Tanjung Jabung Barat
0,7034 (Berkembang)	0,7450 (Maju)	0,6993 (Berkembang)

Capaian Tahun 2024 berdasarkan Data Indeks Desa Membangun, dengan rata-rata Nasional 0,7034 dengan status berkembang, untuk status IDM Provinsi Provinsi Jambi memperoleh 0,7450 termasuk status Maju. Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 mendapatkan nilai rata-rata 0,6993 dengan status berkembang. Keseluruhan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 114 desa, Jumlah Desa

Mandiri ada 14 atau 12,28%, yaitu; Desa Bukit Harapan, Desa Adi Purwa, Desa Pinang Gading, Desa Purwodadi, Desa Dataran Kempas, Desa Dusun Mudo, Desa Kemang Manis, Desa Rantau Badak Lamo, Desa Intan Jaya, Desa Bukit Indah, Desa Lubuk Sebontan, Desa Pematang Balam, Desa Sungai Muluk, dan Desa Sungai Papauh. Jumlah Desa Maju ada 28 Desa atau 24,56%, Jumlah Desa Berkembang 72 Desa atau 63,16%.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- a. Sumber daya aparatur desa yang semakin baik melalui pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan juga semakin besarnya bantuan keuangan yang diterima Desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Tingginya dukungan dan intervensi dari Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terhadap tiga indikator Indeks Desa Membangun, ketahanan sosial, ketahanan ekologi dan ketahanan ekonomi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya efisiensi, antara lain:

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia
- b. Penggunaan listrik untuk AC, lampu, dan computer digunakan pada saat jam kerja. penggunaan air sesuai kebutuhan
- c. Alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan
- d. Pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan secara rutin

Meski kualitas dan kuantitas belum mencukupi, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada cukup memberi dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga sedikit banyak juga memberikan pengaruh dalam keberhasilan pencapaian target kinerja.

7). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dan mendukung pencapaian kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau merupakan kegiatan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut;

Tabel III.9 Program dan Kegiatan yang berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
TOTAL ANGGARAN						Rp2.406.241.850	Rp2.588.498.050	Rp2.125.164.811	Rp302.024.439	82,10
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Rp67.262.000	Rp67.262.000	Rp39.090.000	Rp28.172.000	58,12
2	13	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa	Rp67.262.000	Rp67.262.000	Rp39.090.000	Rp28.172.000	58,12
2	13	02	2.01	0003	Sub kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Rp67.262.000	Rp67.262.000	Rp39.090.000	Rp28.172.000	58,12
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp1.050.102.800	Rp1.071.050.200	Rp909.210.200	Rp161.840.000	84,89
2	13	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp1.050.102.800	Rp1.071.050.200	Rp909.210.200	Rp161.840.000	84,89
2	13	04	2.01	0004	Sub kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum desa	Rp161.000.000	Rp161.000.000	Rp130.625.000	Rp30.375.000	81,13
2	13	04	2.01	0004	Sub kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rp146.600.000	Rp146.600.000	Rp119.480.000	Rp27.120.000	81,50
2	13	04	2.01	0005	Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp137.091.000	Rp124.171.000	Rp118.571.000	Rp5.600.000	95,49
2	13	04	2.01	0008	Sub kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Rp94.357.800	Rp82.675.200	Rp77.375.200	Rp5.300.000	93,59
2	13	04	2.01	0011	Sub kegiatan Fasilitas penyusunan profil desa	Rp44.825.000	Rp44.825.000	Rp44.825.000	Rp0	100,00
2	13	04	2.01	0013	Sub kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	Rp59.250.000	Rp59.250.000	Rp54.950.000	Rp4.300.000	92,74
2	13	04	2.01	0014	Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Rp209.329.000	Rp241.379.000	Rp204.384.000	Rp36.995.000	84,67
2	13	04	2.01	0015	Sub kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp94.850.000	Rp94.850.000	Rp42.700.000	Rp52.150.000	45,02
2	13	04	2.01	0018	Sub kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Rp102.800.000	Rp116.300.000	Rp116.300.000	Rp0	100,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp1.288.877.050	Rp1.450.185.850	Rp1.176.864.611	Rp112.012.439	81,15

2	13	05	2.01		Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Rp1.288.877.050	Rp1.450.185.850	Rp1.176.864.611	Rp112.012.439	81,15
2	13	05	2.01	0003	Sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp158.837.400	Rp158.837.400	Rp145.957.400	Rp12.880.000	91,89
2	13	05	2.01	0006	Sub kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Rp84.321.200	Rp21.950.000	Rp21.950.000	Rp62.371.200	100,00
2	13	05	2.01	0009	Sub kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp1.045.718.450	Rp1.269.398.450	Rp1.008.957.211	Rp36.761.239	79,48

Program paling mendukung adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa, dimana didalam program ini terdapat;

- Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan desa, yang berkaitan dengan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).
- Sub kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa, dengan adanya BUM desa di setiap desa dapat menunjang perekonomian desa.

Tabel III. 10. BUMdesa yang berkontribusi terhadap PAD

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS KEGIATAN USAHA
I	KECAMATAN TUNGKAL ULU			
		BRASAU	KARYA BERSAMA	Toko Bangunan, BRI Link, Sewa Pasar, Sewa GOR, Sewa Tenda, Sewa Kolam
II	KECAMATAN TEBING TINGGI			
		PURWODADI	BUMDES MANDIRI SEJAHTERA PWD	Pembuatan popok kompos, pengelolaan pasar, siram jalan, pisang cavendish, ternak sapi
		SUKA DAMAI	MAKMUR SEJAHTERA	Gas LPG 3 Kg, ternak kambing domba, Jual beli motor bekas, bengkel motor, BRI Link
		ADI JAYA	MAJU JAYA	Tandan buah segar, BRI Link, Simpan pinjam, pupuk dan racun, simpan pinjam perempuan, pertashop
		TELUK PENGKAH	MULIA	BRI Link
		TALANG MAKMUR	BUMDES MAKMUR SEJAHTERA	Pangkalan Gas LPG, TKBM Raam, Ambulance Desa

		SUNGAI KERUH	SUMBER REJEKI	Kompos, BRI Link, toko bangunan, toko pertanian, pangkalan gas LPG
		DATARAN KEMPAS	GERBANG NUSANTARA	Perantara kompos, pengelola pupuk, ternak sapi
III	KECAMATAN BATANG ASAM			
		SRI AGUNG	MAJU JAYA SRI AGUNG	Gas elpiji 3 kg, hentraktor, penggemukan sapi, budidaya madu
		KAMPUNG BARU	PESAPUAN JAYA MANDIRI	Toko bangunan, sewa tenda
		LUBUK LAWAS	BINA KARYA BERSAMA	Jasa perdagangan, Keuangan
IV	KECAMATAN RENAH MENDALUH			
		CINTA DAMAI	JAYA KUSUMA	Tenda, molen, pasar
		BUKIT BAKAR	SUMBER MULIA	Ternak Sapi, Sewa Tenda pesta, Simpan Pinjam (SPP)
V	KECAMATAN MERLUNG			
		TANJUNG MAKMUR	MAKMUR BERSAMA	Penjualan ayam potong, Toko BUMDes, Produksi Pupuk Kompos
VI	KECAMATAN MUARA PAPALIK			
		DUSUN MUDO	KEMOTAI JAYA	Kompos, pasar, desmart
		INTAN JAYA	JAYA MAKMUR	Sewa kios pasar, sewa los pasar, bebek petelur, pakan bebek, simpan pinjam
		KEMANG MANIS	KEMANG NIAGA MANDIRI	Unit pasar desa, unit BRI Link, unit KN Mart, unit sewa
		LUBUK SEBONTAN	TIRTA MUKTI	Pam Desa, Do TBS, LKM, peternakan
		SUNGAI PAPAUH	MEKAR JAYA	BRI Link, waserda, saprodi
		PEMATANG BALAM	USAHA MAJU BERSAMA	Waserda, toko tani, BRI Link
VII	KECAMATAN SENYERANG			
		KEMPAS JAYA	JAYA LESTARI	Penyewaan tenda dan kursi, penyewaan sound system, BRI Link, penyertaan modal 100 juta
		SUNGAI LANDAK	CIPTA KARYA	Sewa kursi
		SUNGAI KEPAYANG	BUMDES MAJU SEJAHTERA	unit BRI Link, unit tenda, unit penyebrangan
VIII	KECAMATAN SEBERANG KOTA			
		KUALA KAHAR	BUMDES BERSAMA	Penyewaan tenda hajatan dan penyewaan mesin pengaduk semen (molen), unit PLTS tidak aktif, unit usaha saprotan belum
IX	KECAMATAN BETARA			
		PEMATANG LUMUT	KARYA BHAKTI BERSAMA	Pengangkutan sampah, sewa mesin diesel, cucian mobil dan motor

		MAKMUR JAYA	BANGKIT BERSAMA	Tenda, perahu, budidaya ikan
		SERDANG JAYA	TEGAR GEMILANG	Sistem penyelenggara perdagangan alternatif, industri air minum isi ulang, koperasi simpan pinjam sekunder
		TERJUN GAJAH	PUJIKU ARTOMORO	Pamsimas, bidang pertanian, peternakan kambing
		MUNTIALO	BINA LESTARI	Wisata Embung, sewa tenda, isi ulang gas
		TELUK KULBI	JADI MULYA	Kantin pintar, simpan pinjam, jual beli sawit, sewa molen, sewa viar, sewa tenda, sewa kursi, jual beli pinang, wifi
		SUNGAI TERAP	AMANAH	Jual beli pinang dan tabung gas
		BUNGA TANJUNG	KARYA BAKTI	Rental perahu, rental molen, jual beli pinang, konter pulsa, simpan pinjam, kebun pinang
X	KECAMATAN PENGABUAN			
		SUNGAI SERINDIT	TRI KARSA/USAHA BERKAH PENGABUAN	Sewa tenda, sewa pompong, fotocopy dan ATK, jual beli padi, pipalisan
		MEKAR JATI	JATI MAKMUR	Wifi, tenda, molen, transportasi air
		PARIT BILAL	SUMBER MAKMUR	Jasa sewa tenda, alat transportasi viar
		SUAK SAMIN	SUMBER KENCANA	Tenda, viar, BRI Link, molen, genset
		SUNGAI RAYA	USAHA BERSAMA	Perdagangan, jasa internet desa
		PASAR SENIN	USAHA BERSAMA	Internet desa, tenda dan sound system
XI	KECAMATAN BRAM ITAM			
		BRAM ITAM KANAN	PRAMBANAN	Pembiayaan, Kebun sawit
		TANJUNG SENJULANG	USAHA KARYA BERSAMA	Sewa Tenda, sewa molen, jual beli material, depot air minum, photography
		PEMBENGIS	SEDERHANA	Perdagangan
		BRAM ITAM RAYA	RAYA	Sewa tenda hajatan, ATM Mini, Sewa molen beton, Jasa Videografi, Pembuatan medali dan souvenir
		JATI EMAS	SEPAH BERUANG	Unit usaha kompos, unit usaha sewa molen, unit usaha BRI Link, unit usaha pembibitan
		KEMUNING	USAHA KEMUNING	Tabung gas LPG 3 Kg, air bersih, lapak pasar, sewa tenda, sewa molen

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan dan fisik secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut;

Tabel III.11 Realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Total Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
Rp7.331.990.964,-	Rp6.576.882.991,-	89,70%	95,15%

Tabel III.12 Anggaran Tahun 2024 dan Realisasinya

KODE REKENING					KETERANGAN	ANGGARAN		REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp6.786.469.865	Rp7.331.990.964	Rp6.576.882.991	Rp755.107.973	89,70
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.380.228.015	Rp4.743.492.914	Rp4.451.718.180	Rp291.774.734	93,85
2	13	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp46.568.000	Rp46.568.000	Rp43.648.000	Rp2.920.000	93,73
2	13	01	2.01	00 06	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp46.568.000	Rp46.568.000	Rp43.648.000	Rp2.920.000	93,73
2	13	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.463.530.045	Rp3.591.051.144	Rp3.374.982.507	Rp216.068.637	93,98
2	13	01	2.02	00 01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.238.095.045	Rp3.353.616.144	Rp3.141.907.507	Rp211.708.637	93,69
2	13	01	2.02	00 02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp225.435.000	Rp237.435.000	Rp233.075.000	Rp4.360.000	98,16
2	13	01	2.02		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp52.500.000	Rp72.600.000	Rp72.600.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.05	00 02	Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp52.500.000	Rp72.600.000	Rp72.600.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp510.878.370	Rp644.364.170	Rp613.721.790	Rp30.642.380	95,24
2	13	01	2.06	00 01	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp3.275.520	Rp3.275.520	Rp3.268.260	Rp7.260	99,78
2	13	01	2.06	00 02	Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp42.990.000	Rp42.990.000	Rp42.990.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.06	00 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp14.000.000	Rp17.920.000	Rp15.610.000	Rp2.310.000	87,11

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2024**

2	13	01	2.06	00 05	Penyediaan barang cetakan penggandaan	Rp44.175.000	Rp41.702.000	Rp39.202.000	Rp2.500.000	94,01
2	13	01	2.06	00 06	Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp3.980.000	Rp1.020.000	79,60
2	13	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp401.437.850	Rp533.476.650	Rp508.671.530	Rp24.805.120	95,35
2	13	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp0	Rp101.998.000	Rp101.998.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.07	00 05	Sub Kegiatan pengadaan mebel		Rp78.172.000	Rp78.172.000		
2	13	01	2.07	00 06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Rp23.826.000	Rp23.826.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.08		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp99.766.000	Rp103.621.000	Rp81.369.103	Rp22.251.897	78,53
2	13	01	2.08	00 01	Sub kegiatan Penyediaan surat menyurat	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.08	00 02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp78.115.000	Rp79.670.000	Rp57.418.103	Rp22.251.897	72,07
2	13	01	2.08	00 04	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp19.651.000	Rp21.951.000	Rp21.951.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp206.985.600	Rp183.290.600	Rp163.398.780	Rp19.891.820	89,15
2	13	01	2.09	00 01	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	Rp175.046.000	Rp151.351.000	Rp131.542.380	Rp19.808.620	86,91
2	13	01	2.09	00 06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp7.940.000	Rp7.940.000	Rp7.940.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.09	00 09	Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp23.999.600	Rp23.999.600	Rp23.916.400	Rp83.200	99,65
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Rp67.262.000	Rp67.262.000	Rp39.090.000	Rp28.172.000	58,12
2	13	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan penataan desa	Rp67.262.000	Rp67.262.000	Rp39.090.000	Rp28.172.000	58,12
2	13	02	2.01	00 03	Sub kegiatan Pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa	Rp67.262.000	Rp67.262.000	Rp39.090.000	Rp28.172.000	58,12
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp1.050.102.800	Rp1.071.050.200	Rp909.210.200	Rp161.840.000	84,89
2	13	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp1.050.102.800	Rp1.071.050.200	Rp909.210.200	Rp161.840.000	84,89
2	13	04	2.01	00 04	Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Rp161.000.000	Rp161.000.000	Rp130.625.000	Rp30.375.000	81,13
2	13	04	2.01	00 04	Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp146.600.000	Rp146.600.000	Rp119.480.000	Rp27.120.000	81,50
2	13	04	2.01	00 05	Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp137.091.000	Rp124.171.000	Rp118.571.000	Rp5.600.000	95,49

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2024**

2	13	04	2.01	00 08	Sub kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Rp94.357.800	Rp82.675.200	Rp77.375.200	Rp5.300.000	93,59
2	13	04	2.01	00 11	Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Rp44.825.000	Rp44.825.000	Rp44.825.000	Rp0	100,00
2	13	04	2.01	00 13	Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp59.250.000	Rp59.250.000	Rp54.950.000	Rp4.300.000	92,74
2	13	04	2.01	00 14	Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Rp209.329.000	Rp241.379.000	Rp204.384.000	Rp36.995.000	84,67
2	13	04	2.01	00 15	Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp94.850.000	Rp94.850.000	Rp42.700.000	Rp52.150.000	45,02
2	13	04	2.01	00 18	Sub kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Rp102.800.000	Rp116.300.000	Rp116.300.000	Rp0	100,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp1.288.877.050	Rp1.450.185.850	Rp1.176.864.611	Rp112.012.439	81,15
2	13	05	2.01		Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Rp1.288.877.050	Rp1.450.185.850	Rp1.176.864.611	Rp112.012.439	81,15
2	13	05	2.01	00 03	Sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp158.837.400	Rp158.837.400	Rp145.957.400	Rp12.880.000	91,89
2	13	05	2.01	00 06	Sub kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Rp84.321.200	Rp21.950.000	Rp21.950.000	Rp62.371.200	100,00
2	13	05	2.01	00 09	Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp1.045.718.450	Rp1.269.398.450	Rp1.008.957.211	Rp36.761.239	79,48

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, walaupun ada kendala yang dihadapi. Untuk kedepan, agar dapat lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia agar tercapai sasaran strategis yang diinginkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan Lembaga ekonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa antara lain sebagai berikut;

- a. Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- b. Pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa
- c. Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Masih kurangnya inovasi-inovasi yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa

B. Langkah kedepan

Langkah strategis yang rencananya akan dilakukan antara lain;

- a. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan desa
- b. Melaksanakan koordinasi dan pengajuan penambahan personil yang berkompeten sesuai dengan bidangnya kepada BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk penempatan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Membangun semua pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk berinovasi dalam melaksanakan tugas dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisien. Semoga ditahun-tahun mendatang program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa capaian kinerjanya akan lebih baik lagi, Amin.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

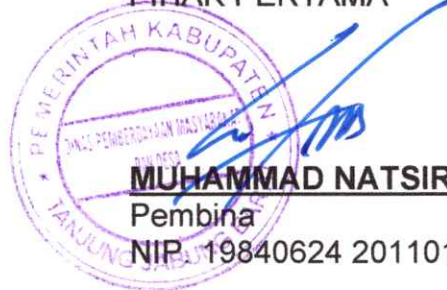
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KualaTungkal, 2024

PIHAK KEDUA

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Pembina

NIP. 19840624 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	81
		Nilai SAKIP Dinas PMD	71,3
2.	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	30%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.380.228.015,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
II. Program Penataan Desa	Rp 67.262.000,-	
III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.050.102.800,-	
IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.288.877.050,-	

Kuala Tungkal, 2024

Bupati Tanjung Jabung Barat

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas dan Fungsi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Desa Maju	Persentase Desa Maju	Kepala Dinas/Pengguna Anggaran	$= \frac{\text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas PMD	

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.I.P
Rembina
NIP. 19840624 201101 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARDHIAN, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

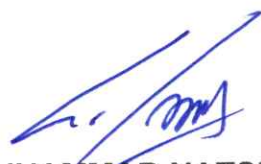
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

PIHAK PERTAMA


ARDHIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671225 198810 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	81
		Nilai SAKIP Dinas PMD	71,3

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.380.228.015 ,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp46.568.000,-	
a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp46.568.000,-	
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.463.530.045,-	
a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan keuangan	Rp3.238.095.045,-	
b. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp225.435.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp52.500.000,-	
a. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Rp52.500.000,-	
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp510.878.370,-	
a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp3.275.520,-	
b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp42.990.000,-	
c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Rp14.000.000,-	
d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp44.175.000,-	
e. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp5.000.000,-	

f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp401.437.850,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp99.766.000,-
a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Rp2.000.000,-
b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Rp78.115.000,-
c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp19.651.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp206.985.600,-
a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp175.046.000,-
b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp7.940.000,-
c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp23.999.600,-

Kuala Tungkal, 21 Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ARDHIAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671225 198810 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESSY ZUZANNA, S. Pd. I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

PIHAK PERTAMA

DESSY ZUZANNA, S. Pd I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

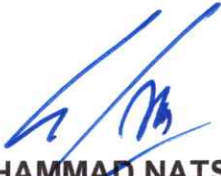
NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan desa	Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan	61%
2.	Meningkatnya penataan desa	Persentase desa yang dilakukan penataan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penataan Desa	Rp67.262.000,-	Pendapatan Asli Daerah
1. Kegiatan penyelenggaraan penataan desa	Rp67.262.000,-	(PAD)
a. Sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Rp67.262.000,-	
II. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp602.270.000,-	
1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp602.270.000,-	
a. Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Rp161.000.000,-	
b. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp137.091.000,-	
c. Sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Rp209.329.000,-	
d. Sub kegiatan penetapan dan penegasan batas desa	Rp94.850.000,-	

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005


DESSY ZUZANNA, S.Pd.I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

PIHAK PERTAMA

H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan	61%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp205.850.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp205.850.000,-	
a. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp146.600.000,-	
b. Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan asset desa	Rp59.250.000,-	

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

PIHAK PERTAMA

Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan	61%
2.	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
I.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp241.982.800,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp241.982.800,-	
	a. Sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Rp94.357.800,-	
	b. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	Rp44.825.000,-	
	c. Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Rp102.800.000,-	
II.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp1.288.877.050,-	
	1. Kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Rp1.288.877.050,-	
	a. Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp158.837.400,-	

b. Sub kegiatan fasilitasi pemerintah desa
dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

Rp84.321.200,-

c. Sub kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK
dalam penyelenggaraan Gerakan
pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan keluarga

Rp1.045.718.450,-

Kuala Tungkal,

2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Pembina

NIP. 19840624 201101 1 005

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Hj. DARMAILENY, SE, MM

Pembina

NIP. 19780520 200003 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

PIHAK PERTAMA

GUSNIAR, S.E., M.E
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan keuangan perangkat daerah	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100%
		Persentase tingkat kedisiplinan pegawai	100%
		Cakupan layanan administrasi umum	100%
		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
		Jumlah total BMD yang terpelihara	55 Unit

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.333.660.015	Pendapatan Asli Daerah
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	,-	(PAD)
a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan keuangan	Rp3.463.530.045,- Rp3.238.095.045,-	
b. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp225.435.000,-	
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp52.500.000,-	
a. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Rp52.500.000,-	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp510.878.370,-	
a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp3.275.520,-	
b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp42.990.000,-	
c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Rp14.000.000,-	
d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp44.175.000,-	

- e. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp5.000.000,-
- f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp401.437.850,-
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp99.766.000,-
 - a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Rp2.000.000,-
 - b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Rp78.115.000,-
 - c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp19.651.000,-
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp206.985.600,-
 - a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp175.046.000,-
 - b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp7.940.000,-
 - c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya Rp23.999.600,-

Kuala Tungkal,

2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005



GUSNIAR, S.E, ME
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANA FARADINA, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUHAMMAD NATSIR, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005

ANA FARADINA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19820402 200904 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA SUB BAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

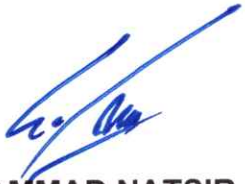
NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen tahunan yang disusun	6 dokumen
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp46.568.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp46.568.000,-	

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


MUHAMMAD NATSIR, S.IP
Pembina
NIP. 19840624 201101 1 005


ANA FARADINA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19820402 200904 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MERDIANSYAH, SE**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

Hj. DARMAILENY, SE, MM

Pembina

NIP. 19780520 200003 2 001

PIHAK PERTAMA

MERDIANSYAH, SE

Penata

NIP. 19810902 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MERDIANSYAH, SE
Penata
NIP. 19810902 201101 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESNITHA RAHAYU, SH**

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

Hj. DARMAILENY, SE, MM

Pembina

NIP. 19780520 200003 2 001

PIHAK PERTAMA

DESNITHA RAHAYU, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19750618 200003 2 005

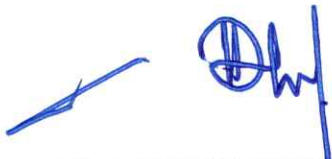
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	1 Dokumen
b.	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 Dokumen
2.	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa	100%
a.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	422 lembaga kemasyar akatan
b.	Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen

Kuala Tungkal,

2024

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Hj. DARMAILENY, SE, MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli
Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESNITHA RAHAYU, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19750618 200003 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEFRIAN EFFENDI**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA


DESSY ZUZANNA, S.Pd.I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

PIHAK PERTAMA


DEFRIAN EFFENDI
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100%
a.	Terlaksananya pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	2 Desa
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	10 Desa

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DESSY ZUZANNA, S.Pd.I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli
Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DEFRIAN EFFENDI
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAMRI ERIADY, ST**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

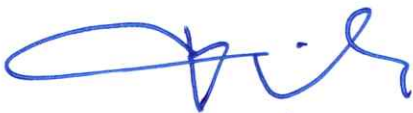
TAMRI ERIADY, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19801025 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	114 Dokumen
b.	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	1 Laporan

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



TAMRI ERIADY, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19801025 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIMA RUSILOWATI, S.IP**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd. I**
Jabatan : **Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

RIMA RUSILOWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19791012 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	57 orang

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013



RIMA RUSILOWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19791012 201001 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMILA HITANOVA, SE**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : **Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

AMILA HITANOVA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730313 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



AMILA HITANOVA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730313 200604 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINALDI, SAP**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : **Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

RINALDI, SAP
Penata
NIP. 19720525 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Persentase jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	administarsi pemerintahan desa Terlaksananya fasilitasi pengelolaan asset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa	1 dokumen

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



RINALDI, SAP
Penata
NIP. 19720525 199803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN LOVITA, SKM**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd.I**
Jabatan : **Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

PIHAK PERTAMA

DIAN LOVITA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19750404 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	114 orang

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

DIAN LOVITA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19750404 199703 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BOBBI KURNIA HAJAR, SH**

Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd.I**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I

Pembina

NIP. 19780328 200604 2 013

PIHAK PERTAMA

BOBBI KURNIA HAJAR, SH

Penata Muda

NIP. 19960621 202012 1 009

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	114 Dokumen

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



BOBBI KURNIA HAJAR, SH
Penata Muda
NIP. 19960621 202012 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512

Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROZIANDA, SH**

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. DARMAILENY, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

Hj. DARMAILENY, SE, MM

Pembina

NIP. 19780520 200003 2 001

PIHAK PERTAMA

ROZIANDA, SH

Golongan IX

NIP. 19941223 202421 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibina	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina	100%
a.	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	1 dokumen

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Hj. DARMAILENY, SE,MM
Pembina
NIP. 19780520 200003 2 001

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ROZIANDA, SH
Golongan IX
NIP. 19941223 202421 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FERRY IRAWAN, S.AP**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DESSY ZUZANNA, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA

DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

PIHAK PERTAMA

FERRY IRAWAN, S.AP
Penata
NIP. 19750616 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan pendapatan aparatur pemerintah desa	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Menganalisa dan mengolah data pendapatan aparatur pemerintah desa	Jumlah bahan yang dianalisa	114 berkas
3.	Mengevaluasi data pendapatan aparatur pemerintah desa	Jumlah data yang dievaluasi	114 berkas
4.	Melaporkan hasil evaluasi data pendapatan aparatur pemerintah desa	Jumlah laporan yang dibuat	1 berkas

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


DESSY ZUZANNA, S.Pd. I
Pembina
NIP. 19780328 200604 2 013

Penelaah Teknis Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


FERRY IRAWAN, S.AP
Penata
NIP. 19750616 200604 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUBUDIYAH**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GUSNIAR, S.E., ME
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021

NURUBUDIYAH
Penata Muda
NIP. 19800610 200701 2 032

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan/data terkait dengan urusan kepegawaian	Jumlah bahan yang dikumpulkan	24 dokumen
2.	Menyelenggarakan administrasi kepegawaian	Jumlah bahan yang dianalisa	12 dokumen
3.	Melakukan penyimpanan arsip kepegawaian	Jumlah data yang dievaluasi	24 dokumen
4.	Melaporkan hasil pelaksanaan pengadministrasian kepegawaian	Jumlah laporan yang dibuat	1 laporan

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


GUSNIAR, S.E., ME
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021


NURUBUDIYAH
Penata Muda
NIP. 19800610 200701 2 032



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUDI**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

PIHAK PERTAMA

WAHYUDI
Penata Muda
NIP. 19731010 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Mengolah dan menganalisa bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang dianalisa	114 berkas
3.	Mengevaluasi bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah bahan yang evaluasi	114 berkas
4.	Melaporkan hasil evaluasi bahan keuangan dan pendapatan desa	Jumlah laporan yang dibuat	12 dokumen

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



WAHYUDI
Penata Muda
NIP. 19731010 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARSITO**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEFRIAN EFFENDI**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

DEFRIAN EFFENDI

Penata Tingkat I

NIP. 19721214 199803 1 003

PIHAK PERTAMA

WARSITO

Pengatur Tingkat I

NIP. 19790129 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BIDANG FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan/data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Menganalisa dan mengolah data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Jumlah bahan yang dianalisa	114 berkas
3.	Mengevaluasi data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Jumlah data yang dievaluasi	114 berkas
4.	Melaporkan hasil evaluasi data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	Jumlah laporan yang dibuat	1 berkas

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Fasilitasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DEFRIAN EFFENDI
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199803 1 003

Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



WARSITO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19790129 200701 1 007



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASPUL ANWAR**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA


GUSNIAR, S.E, ME
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021

PIHAK PERTAMA


KASPUL ANWAR
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19730618 200701 1 020

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Melakukan penyusunan bahan dan dokumentasi untuk rekonsiliasi aset	Jumah kegiatan penyusunan	13 kali
2.	Melakukan inventarisasi barang per ruangan (KIR)	Jumlah KIR yang dibuat	13 buah
3.	Membuat laporan tentang kondisi asset yang ada	Laporan yang dibuat	12 laporan

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



GUSNIAR, S.E., ME
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021

Pengadministrasi Perkantoran
Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



KASPUL ANWAR
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19730618 200701 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYARIPUDIN**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2024

PIHAK KEDUA


GUSNIAR, S.E, ME
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021

PIHAK PERTAMA


SYARIPUDIN
Penata Muda
NIP. 19790322 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan	Jumlah dokumen yang dibuat	84 dokumen
2.	Melaksanakan pembukuan dan administrasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan	Jumlah dokumen yang dibukukan	84 dokumen
3.	Melakukan pembayaran atas belanja keperluan dinas	Jumlah pembayaran yang dilakukan	200 kali
4.	Melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada pengguna anggaran	Jumlah laporan yang dibuat	12 laporan

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pengadministrasi Perkantoran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



GUSNIAR, S.E, ME
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021



SYARIPUDIN
Penata Muda
NIP. 19790322 200701 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas, Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512

Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY SUMARNO**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNIAR, SE, ME**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

GUSNIAR, S.E, ME

Penata Tingkat I

NIP. 19830401 200604 2 021

PIHAK PERTAMA

EDY SUMARNO

Pengatur Tingkat I

NIP. 19820807 201001 1 023

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu Bendahara melaksanakan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah berkas yang dibuat	28 berkas
2.	Membantu Bendahara melaksanakan administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan PNS	Jumlah Berkas yang dibuat	24 berkas

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

GUSNIAR, S.E., ME
Penata Tingkat I
NIP. 19830401 200604 2 021

Pengadministrasi Perkantoran
Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

EDY SUMARNO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19820807 201001 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan A. Majid Brangas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 36512
Laman: dpmd.tanjabbarkab.go.id Pos-el: dpmd@tanjabbarkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI APRIANSYAH**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI BAHARUDDIN, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

DEDI APRIANSYAH
Pengatur
NIP. 19830422 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BIDANG FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan/data aset desa	Jumlah bahan yang dikumpulkan	114 berkas
2.	Mengolah dan menganalisa bahan/data aset desa	Jumlah bahan yang dianalisa	114 berkas
3.	Mengevaluasi bahan/data aset desa	Jumlah bahan yang evaluasi	114 berkas
4.	Melaporkan hasil evaluasi bahan/data aset desa	Jumlah laporan yang dibuat	1 dokumen

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ANDI BAHARUDIN, S.STP
Pembina
NIP. 19740506 199403 1 006

Pengadministrasi Perkantoran
Bidang Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DEDI APRIANSYAH
Pengatur
NIP. 19830422 201101 1 005